



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**

TAHUN 2013



**NOMOR : LAKIP-434/PW27/1/2013
TANGGAL : 31 DESEMBER 2013**

Ringkasan Eksekutif

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat yang sebelumnya wilayah kerjanya berada/merupakan bagian dari Perwakilan BPKP Provinsi Papua telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2014 yang tertuang dalam Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Nomor : KEP-1252/PW26/1/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan kegiatan, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai. serta rencana pendanaan dalam tahun 2010-2014, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) setiap tahun. Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor : 11 Tahun 2013, bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat telah mandiri, maka berdasarkan Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Nomor : KEP-16/PW27/2013 tanggal 27 Maret 2013 telah ditetapkan tentang Suplemen Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2014 yang merupakan dukungan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan tersebut.

Visi Perwakilan BPKP adalah menjadi Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas. Sebagai auditor Presiden, Perwakilan BPKP berperan membantu pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014.

Untuk mewujudkan visinya, BPKP memiliki empat misi, yaitu (1) menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata pemerintahan yang baik dan bebas KKN di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat; (2) membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat; (3) mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat; serta (4) menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi presiden/pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat.

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, BPKP menetapkan enam tujuan strategis yang akan dicapai dalam tahun 2010-2014, yaitu (1) meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan Negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat; (2) meningkatnya tata pemerintahan yang baik di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat; (3) terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan Negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat; (4) tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat; (5) meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat; dan (6) terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat.

Untuk mencapai tujuan strategis di atas, dalam tahun 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat telah merumuskan delapan sasaran strategis sebagai tindak lanjut atas surat Menteri PAN dan RB Nomor B/3293/M.PAN-RB/11/2013 tanggal 30 November 2013 tentang hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPKP. Perumusan sasaran strategis diikuti dengan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa *outcome* dan *output*, serta penetapan IKU dominan sebagai dasar pengukuran capaian sasaran strategis.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP Tahun 2013 ini merupakan salah satu media yang menunjukkan kesiapan Perwakilan BPKP untuk mampu menjawab pertanyaan atas pencapaian kinerja tahun 2013. LAKIP ini juga sebagai alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja tahun 2013 menunjukkan bahwa sebanyak tujuh dari delapan sasaran strategis BPKP telah tercapai, sementara satu sasaran strategis belum sepenuhnya tercapai. Delapan sasaran strategis BPKP berikut capaiannya dapat dilihat pada Tabel RE.1.

Tabel RE.1.
Capaian Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Capaian Sasaran
1.	Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD	100,00%
2.	Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara Sebesar 87,50%	62,50%
3.	Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 300 IPD dan Terselenggaranya <i>Good Governance</i> pada 75% BUMN/BUMD	100,00%

No.	Sasaran Strategis	Capaian Sasaran
4.	Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%	100,00%
5.	Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 68,75% K/L/Pemda	100,00%
6.	Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 75% K/L/Pemda	100,00%
7.	Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100%	100,00%
8.	Terselenggaranya Satu Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan	100,00%

Keberhasilan capaian sasaran strategis diukur dengan IKU yang menggambarkan peran Perwakilan BPKP dalam memberikan nilai tambah bagi *stakeholders*. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi pengukuran atas realisasi 11 IKU yang paling mempengaruhi capaian sasaran strategis (IKU dominan) dari 40 IKU yang telah ditetapkan dalam Tapkin BPKP Tahun 2013. Pengukuran kemudian dilanjutkan dengan analisis, khususnya terhadap IKU yang menyimpang jauh dari targetnya. Realisasi pencapaian delapan sasaran strategis tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas 95% Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dan 95% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Capaian sasaran strategis tahun 2013 ditunjukkan oleh capaian dua IKU dominan, dengan realisasi sebagai berikut:

- a. Jumlah instansi vertikal yang mendapat pendampingan sebanyak 20 instansi dari 12 instansi target dalam Tapkin, atau mencapai 185,19% dari target sebesar 90%.
- b. Jumlah Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP sebanyak 5 dari 11 Pemda yang di asistensi oleh BPKP, atau mencapai 252,33% dari target sebesar 18%.

2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%

Capaian sasaran strategis tahun 2013 ditunjukkan oleh capaian IKU dominan “persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti”, yang diukur dari jumlah tindak lanjut (rekomendasi/saran) sebanyak 1 tindak lanjut dibagi dengan jumlah rekomendasi/saran hasil audit OPN/OPAD sebanyak 2 rekomendasi atau mencapai 62,50% dari target 80%. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan adanya revisi PKPT tahun 2013 yaitu PKPT sebelumnya sebanyak 2 PP direvisi hanya 1 PP

disebabkan obrik tersebut tidak terdapat dalam wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat.

3. Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD

Capaian sasaran strategis tahun 2013 ditunjukkan oleh capaian dua IKU dominan, dengan realisasi sebagai berikut:

- a. Atas IKU “persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal”, Perwakilan BPKP melakukan audit kinerja Pelayanan Pemda Bidang Pendidikan dan Kesehatan atas 18 IPD untuk mendorong seluruh Pemda tersebut mencantumkan SPM ke dalam dokumen perencanaan. Apabila dibandingkan dengan targetnya sebanyak 10 IPD, maka diperoleh capaian IKU sebesar 100,00%.
- b. Atas IKU “persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja 2 BUMD dari yang ditargetkan dalam Tapkin 1, atau mencapai 200%.

4. Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%

Capaian sasaran strategis tahun 2013 ditunjukkan oleh capaian IKU dominan “Kelompok Masyarakat/laporan yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi”, yang diukur berdasarkan jumlah Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi dengan realisasi sebanyak 16 kelompok masyarakat/laporan, dengan capaian sebesar 228,37% atas target sebesar 7 kelompok/laporan.

Dari Realisasi IKU Tahun 2013 sebanyak 16 kelompok masyarakat/laporan antara lain ; Koordinasi sebanyak 10 PP, Workshop 3 PP, Diklat 1 PP, Raker Investigasi 1 PP, dan Sospak 1 Kegiatan.

5. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 68,75% K/L/Pemda

Capaian sasaran strategis tahun 2013 ditunjukkan oleh capaian IKU dominan “Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008”, Pemda yang ada di Papua Barat sebanyak 12 yang beroperasi penuh selama tahun 2013. Dari 12 Pemda tersebut seluruhnya telah menyusun Perkada tentang SPIP. Penyelenggaraan SPIP yang sudah dilakukan Diagnostic Assessment sebanyak 5 Pemda, yang dilakukan Monitoring Perbaikan sebanyak 5 Pemda, dan yang sudah menyusun Rencana Tindak

Pengendalian (RTP) sebanyak 2 Pemda. Provinsi Papua Barat adalah daerah baru terbentuk dan Perwakilan BPKP Papua Barat mengukur berdasarkan Pemda yang opini LK WDP sebanyak 5 Pemda dari 11 Pemda yang di asistensi (kecuali Kabupaten Fakfak) dengan realisasi 45,45%, dengan capaian 252,33% atas target sebesar 18%.

Capainya realisasi IKU dominan tersebut akan memperbaiki adanya kondisi sebagai berikut :

- a. Pemda masih mengandalkan bimbingan BPKP dalam menerapkan sosialisasi pedoman/petunjuk teknis dan asistensi penyelenggaraan SPIP.
- b. Implementasi SPIP belum secara integral menyatu dengan operasional instansi, namun baru pada tahap pengembangan infrastruktur pengendalian, berupa *diagnostic assessment*, pemetaan risiko dan penetapan serta pengembangan kebijakan/*Standard Operating Procedure* (SOP).

6. Meningkatkan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 75% K/L/Pemda

Capaian sasaran strategis tahun 2013 ditunjukkan oleh capaian IKU dominan “Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA”, yang diukur dari jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA di bandingkan jumlah seluruh Pemda. Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA sebanyak 2 Pemda dari target sebanyak 2 Pemda, atau realisasi sebesar 16,67%, dengan capaian 200,00% atas target sebesar 8,33%.

7. Meningkatkan Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100%

Capaian sasaran strategis tahun 2013 ditunjukkan oleh dua IKU dominan, dengan realisasi sebagai berikut:

- a. IKU “persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi”, diukur dengan membandingkan antara realisasi PP PKPT dibandingkan dengan target PP dalam PKPT. Pada tahun 2013, jumlah realisasi penugasan adalah 210 atau 100,00% dari 210 rencana penugasan, dengan capaian 117,65% atas target sebesar 85,00%.

Selain itu, pada tahun 2013 Perwakilan BPKP Papua Barat telah melaksanakan penugasan di luar yang direncanakan sebanyak 240 penugasan khususnya untuk memenuhi permintaan stakeholders.

b. IKU “Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP” diukur dari hasil reviu Inspektorat BPKP terhadap laporan keuangan perwakilan, dengan nilai 100% apabila tidak ada catatan, dan 80% apabila ada catatan. Pada tahun 2013, hasil reviu Inspektorat BPKP atas Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2013 terdapat 3 (tiga) catatan rekomendasi perbaikan dan seluruhnya telah ditindaklanjuti, sehingga capaiannya sebesar 125,00% atas target sebesar 80,00%.

8. Terselenggaranya Satu Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan Bagi Pimpinan

Capaian sasaran strategis tahun 2013 ditunjukkan oleh capaian IKU dominan, “jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif” yang diukur dengan jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan dibagi dengan jumlah sistem informasi yang wajib dimanfaatkan BPKP (SIM HP, SIM RKT, SIM MonevRKT, SAKPA, SIMAK BMN, RKAKL, SPM, SPPD, DMS, SIMPEG). Realisasi IKU tahun 2013 sebanyak 11 sistem informasi yang dimanfaatkan atau mencapai 110,00% dari target sebanyak 10 sistem informasi yang dimanfaatkan.

Hasil Penilaian Sistem AKIP yang dilakukan secara mandiri pada akhir Desember 2013 menunjukkan skor/nilai **91,80** termasuk dalam katagori “**AA / MEMUASKAN**”. Rincian Lembar Kriteria Evaluasi AKIP Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat berdasarkan komponen / sub komponen, Lihat Lampiran 8.

Keseluruhan program yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat pada tahun 2013 menggunakan dana DIPA sebesar Rp 7.845.432.000,00 atau 99,88% dari anggaran sebesar Rp7.854.691.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp3.063.325.854,00, dengan menggunakan SDM sebanyak 14.610 OH atau 150,37% dari rencana sebanyak 9.716 OH.

Secara umum seluruh sasaran strategis dalam tahun 2013 telah tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Namun demikian, masih terdapat beberapa sasaran strategis dan IKU yang masih belum mencapai target yang ditentukan secara maksimal.

Untuk itu, diperlukan upaya dan kerja yang lebih keras lagi untuk mengoptimalkan pencapaian semua sasaran strategis di masa mendatang. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain:

1. Melakukan evaluasi secara berkala metode bimbingan teknis/asistensi penyusunan laporan keuangan kepada pemerintah daerah

2. Peningkatan Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008 diupayakan dengan cara:
 - a. Menuntaskan penguatan dan pengembangan infrastruktur penyelenggaraan SPIP dengan terus meningkatkan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Subkegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung kegiatan tersebut antara lain :
 - a) Menambah jumlah personil satgas pembinaan SPIP yang dapat bertugas secara fokus untuk kegiatan pembinaan penyelenggaraan SPIP.
 - b) Meningkatkan target, realisasi dan kualitas sosialisasi, diklat dan workshop penyelenggaraan SPIP bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
 - c) Meningkatkan intensitas pembimbingan teknis penyelenggaraan SPIP, antara lain segera penyelenggaraan SPIP mulai dari :
 - Perencanaan (pemahaman dan pemetaan);
 - Pelaksanaan (penilaian resiko, pembangunan infrastruktur dan internalisasi);
 - Pengembangan berkelanjutan.
 - b. Berkoordinasi lebih intensif dengan Pemda untuk percepatan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP secara integral dalam kegiatan operasional instansi.
3. Berusaha meningkatkan kinerja dan kualitas output BPKP dengan memegang teguh "PIONIR" dan 5-AS.
4. Perbaiki jaringan LAN, serta mengadakan PPM penerapan aplikasi yaitu SKI dan IPMS.

Manokwari, 31 Desember 2013

Kepala Perwakilan,



Sumitro

NIP 19621020 198302 1001